

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dan memiliki peran penting untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia terlebih untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Berdasarkan Undang-undang no 28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi besar atau kecilnya pendapatan pajak yang diperoleh sangat bergantung kepada seluruh masyarakat terlebih bagi yang sudah memiliki kewajiban sebagai wajib pajak.

Selain dari kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan pembayaran pajak, ada hal lain yang dapat memengaruhi pendapatan pajak yang diterima oleh negara. Hal tersebut merupakan sengketa pajak. Menurut Dwi Resti Pratiwi dan Damia Liana dalam jurnal Buletin APBN Vol.IV Ed. 24, Desember 2019 “Pemerintah kembali akan menghadapi kekurangan penerimaan pajak pada tahun 2019. Tercatat dari Rp132,5 triliun restitusi pajak, Rp22,5 triliun atau 17 persen merupakan konsekuensi dari kekalahan DJP dalam melawan wajib pajak pada pengadilan pajak maupun MA. Rendahnya tingkat kemenangan DJP dalam sengketa pajak menyebabkan DJP harus mengembalikan pajak kepada WP. Hal ini menyebabkan tergerusnya penerimaan pajak. Selama Tahun 2018 tercatat pengajuan permohonan banding sebanyak 7.772 permohonan dan gugatan sebanyak 1.885 permohonan. Dari total jumlah permohonan tersebut Pengadilan Pajak hanya mengeluarkan 6.034 putusan, dari jumlah putusan tersebut hanya 2.059 putusan yang dapat dimenangkan oleh DJP dan sisanya sekitar 64,6 persen dimenangkan oleh WP. Rendahnya tingkat kemenangan DJP dalam sengketa pajak diakui oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menggerus penerimaan pajak.”

Berikut adalah data dari berkas yang diterima oleh Pengadilan Pajak dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.

Tabel 1 Berkas Sengketa Pajak yang diterima oleh Pengadilan Pajak

No	Hasil Putusan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pencabutan	1350	1524	250	240	141
2	Tidak dapat Diterima	1782	701	1053	621	573
3	Menolak	2900	2600	1997	2388	2507
4	Menambah Pajak yang harus dibayar	8	1	9	1	6
5	Mengabulkan Sebagian	1353	1373	1389	1903	2282
6	Mengabulkan Seluruhnya	5332	4982	5228	4937	4598
7	Membatalkan	128	50	37	76	21
	Total	12853	11231	9963	10166	10128

Sumber : TC One (2021)

Data tersebut diambil dari website resmi Pengadilan Pajak. Sengketa Pajak bisa diselesaikan dengan cara banding pajak yang dilakukan di Pengadilan pajak. Banding sendiri merupakan proses menentang keputusan hukum secara resmi. Dalam prosesnya banyak hal yang perlu dilakukan agar Sengketa Pajak tersebut dapat terselesaikan.

Firma DSimplyTax Management Consulting adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perpajakan sebagai konsultan pajak dan kuasa hukum. Dalam hal banding pajak, Firma DSimplyTax berperan sebagai kuasa hukum suatu perusahaan yang memiliki permasalahan dengan Direktur Jenderal Pajak terkait Sengketa Pajak. Yayasan XX merupakan salah satu klien dari Firma DSimplyTax Management Consulting yang bergerak untuk menyalurkan produk-produk kesehatan, alat kontrasepsi dan KB di seluruh wilayah Indonesia. Yayasan XX terlibat dengan kasus sengketa dengan DJP atas keputusan yang dikeluarkan oleh DJP pada 29 Mei 2019. Alur penyelesaian sengketa pajak setelah pemeriksaan adalah keberatan dan kemudi banding. Karena hasil pemeriksaan berupa SKP tidak diterima oleh Yayasan XX maka diajukan keberatan atas SKP tersebut kepada KPP yang menerbitkannya. KPP tersebut kemudian meneruskan ke kanwil sebagai pihak pemutus keberatan. Kanwil menolak keberatan yang diajukan oleh WP dan tetap mempertahankan koreksi pemeriksa. Atas keputusan tersebut Yayasan XX mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak. Ditolaknya keberatan yang diajukan oleh Yayasan XX tidak dikenai sanksi karena SKP Yayasan XX masih lebih bayar sehingga tidak ada sanksi yang harus dibayar atau terutang. Dengan adanya latar belakang tersebut, penulis memiliki ketertarikan dengan Banding Pajak mengenai prosesnya dan mengetahui hal-hal yang memiliki kaitan dengan Banding Pajak. Maka dari itu penulis memilih judul “Tinjauan Terhadap Mekanisme Proses Pelaksanaan Banding Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak pada Yayasan XX” untuk penyusunan Tugas Akhir ini.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyebab timbulnya Sengketa Pajak pada Yayasan XX?
2. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan banding tersebut dilakukan?
3. Bagaimana proses penyerahan berkas banding pajak tersebut dilakukan?
4. Bagaimana proses sidang banding di pengadilan pajak dilaksanakan?
5. Bagaimana hasil putusan pengadilan pajak atas Sengketa Pajak Yayasan XX?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang akan dibahas pada laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan penyebab timbulnya Sengketa Pajak pada Yayasan XX.
2. Menjelaskan prosedur pengajuan permohonan banding dilakukan.
3. Menjelaskan tata cara penyampaian berkas banding dilakukan.
4. Menjelaskan proses sidang banding di pengadilan pajak dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



5. Menjelaskan Hasil Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Pajak pada Yayasan XX.

1.4 Manfaat

Adapun Manfaat dari dilakukannya penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Sekolah Vokasi : Manfaat yang didapatkan bagi pembaca adalah meningkatkan pengetahuan akan pelaksanaan banding pajak untuk memberikan gambaran saat menjadi seorang konsultan pajak. Manfaat yang didapatkan bagi pembaca yaitu diharapkan penulisan tugas akhir ini dapat menjadi bahan untuk penulisan tugas akhir lainnya yang akan datang.
2. Bagi perusahaan : Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan bantuan petunjuk terhadap proses pelaksanaan Banding Pajak dalam pengadilan pajak.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies